

**IMPLEMENTASI MBKM PADA KEGIATAN PENDAMPING PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA SURABAYA DI KELURAHAN KEBRAON**

**Andre Zakarino Muhammad**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[andrezakarino6@gmail.com](mailto:andrezakarino6@gmail.com);

**Yusuf Hariyoko**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang bertujuan untuk mengimplementasikannya dengan mendorong mahasiswa/i Indonesia untuk memperoleh berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk mengetahui dan memahami dunia kerja. Salah satu dari bentuk pembelajaran MBKM adalah Magang/Praktik kerja. Magang MBKM ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan dalam mengimplemantasikan suatu teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan menerapkan keterampilan atau kemampuan umum dan khusus dalam profesional kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah implementasi program MBKM ini pada kegiatan pendamping pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan melayani masyarakat yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Dan kemudian artikel ilmiah yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi pemahaman awal kepada masyarakat dalam pelayanan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat tertata dengan baik.

**Kata kunci :** *MBKM, Implementasi, Administrasi Publik, Pelayanan, Masyarakat*

**ABSTRACT**

The Merdeka Learning Campus Merdeka Program (MBKM) is one of the flagship programs of the Ministry of Education and Culture or the Ministry of Education and Culture which aims to implement it by encouraging Indonesian students to acquire various skills and knowledge that are useful for knowing and understanding the world of work. One of the forms of MBKM learning is an internship/work practice. This MBKM internship aims to provide opportunities or opportunities to implement a theory that has been learned in lectures and apply general and specific skills or abilities in professional work. The research method used is a qualitative research method with analytical descriptive writing techniques. The results obtained in this study are the implementation of the MBKM program in the activities of accompanying population administration services in sub-districts by serving the community who will carry out population administration services. And then the scientific articles

produced will be input for the initial understanding of the community in their daily services, so that it is hoped that they can be well organized.

**Keywords:** *MBKM, Implementation, Public Administration, Service, Community*

## A. PENDAHULUAN

Program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) merupakan kebijakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai dan menumbuhkan berbagai ilmu pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk pembelajaran perguruan tinggi yang mandiri dan fleksibel untuk menciptakan budaya belajar yang inovatif dan tidak membatasi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Proses pembelajaran di kampus Merdeka merupakan perwujudan dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat penting. Pembelajaran di kampus Merdeka memberikan tantangan dan peluang untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kepribadian mahasiswa. Dan juga kemandirian dalam mencari dan menemukan informasi tentang realitas dan dinamika lapangan, seperti: Interaksi Sosial, Kerjasama, Manajemen Diri, Persyaratan Kinerja, Tujuan dan Prestasi. Melalui program merdeka belajar kampus merdeka yang terencana dan dilaksanakan dengan baik, sehingga hard dan soft skill mahasiswa akan sangat terlatih.

Jurusan Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini berpartisipasi langsung dalam program Kemendikbudristek yaitu Kampus Mandiri Belajar Mandiri (MBKM) dimana salah satu sub programnya adalah pelatihan magang. Magang ini ditawarkan pada semester tujuh dimana setiap mahasiswa yang mengikuti program MBKM harus mempersiapkan materi atau pengetahuan yang cukup untuk diikuti. Salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah program magang ini adalah harus mempelajari semua mata kuliah semester tujuh dengan dibatasi 20 sks dan akan dikonversikan ke dalam program magang. Setelah selesai mengikuti program magang ini mahasiswa diwajibkan menyusun laporan magang yang telah didiskusikan dengan kaprodi dan dosen pembimbing magang tersebut. Dengan hasil program MBKM ini diharapkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman semua mahasiswa terhadap program MBKM. Penelitian ini juga harapannya dapat sebagai bahan evaluasi pihak pengelola program MBKM di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Kelurahan merupakan suatu struktur pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Wilayahnya termasuk dalam wilayah daerah kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah yang mengemban misi melayani masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kelurahan. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara teknis melingkupi tujuan pelayanan publik, salah satunya adalah terselenggaranya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, kepuasan publik atau masyarakat juga dipengaruhi oleh pelayanan prima dalam situasi yang berbeda. Pelayanan prima kepada masyarakat didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan secara rinci di bidang kerjasama regional sehingga tepat sasaran, terintegrasi, efektif, efisien, dan terukur. Rencana strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang dilakukan selama periode lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau potensial. Renstra ini mencakup cara untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Renstra dapat menjadi pedoman untuk mengarahkan

dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahun sesuai dengan hasil pelaksanaan yang telah diberikan dan ditetapkan. Dalam dinamika Regional/lokal Dispenduk Kota Surabaya dihadapkan pada isu strategis antara lain:

1. Belum seluruhnya penduduk Kota Surabaya memiliki Akte Kelahiran dan KTP-el. Dari data Juni 2019, penduduk Kota Surabaya berjumlah 3.141.921 orang. Yang wajib ber KTP hanya 2.344.098, pemegang KTP 1.992.149 orang, yang belum ber KTP 351.949 orang. Selain itu juga penduduk Kota Surabaya dari yang telah memiliki akta kelahiran 1.421.038 orang dan yang belum memiliki akta kelahiran sejumlah 1.720.883 orang. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan peningkatan pelayanan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan pembangunan infrastruktur TIK dalam mempercepat proses pelayanan pada masyarakat. Beberapa aplikasi pelayanan dibangun dan beberapa infrastruktur jaringan disediakan untuk dapat mewujudkan Good Governance.
2. Sarana dan prasarana yang memiliki ketergantungan pada APBN. Perlunya Sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah terkait pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini sering timbul kendala ketika daerah sesuai UU No. 24 Tahun 2013 pasal 87A menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini menimbulkan beberapa kendala terkait dengan sarana dan prasarana administrasi kependudukan memiliki ketergantungan pada kementerian dalam negeri.
3. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik. Database kependudukan menjadi data dasar dari seluruh pelayanan masyarakat. Diharapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi single identity number dalam melakukan tata kelola pemerintahan seperti perizinan; intervensi bantuan bagi masyarakat miskin baik dari sektor kesehatan, pendidikan dan lainnya; identifikasi data seseorang untuk membantu pihak kepolisian dalam melacak kriminalitas; dan lain sebagainya.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam hasil dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan metode yang digunakan, tujuan penggunaan metode penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi dan data yang berkaitan dengan perkembangan penyediaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta menghasilkan informasi sesuai dengan sifat permasalahannya untuk mendapatkan hasil tentang permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan data yang akurat yang dapat digunakan untuk membuat temuan penelitian yang memiliki dasar yang kuat untuk teori yang disajikan. Menurut pendapat dari McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015) meyakini bahwa penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana masyarakat/kelompok atau individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk menjamin kualitas dari proses penelitian, karena peneliti akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis referensi yang telah dikaji sebelumnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penulisan artikel ini dengan mengkaji referensi jurnal nasional dan buku panduan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta beberapa referensi yang relevan. Hasil

analisis terkait implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kegiatan pendamping pelayanan administrasi kependudukan dapat dijelaskan oleh beberapa para ahli sebagai berikut.

Hasil penelitian (Handayani, 2021) menunjukkan bahwa diimplementasikan di perguruan tinggi dalam kebijakan MBKM, yang diimplementasikan melalui kebijakan program studi dengan berbagai kegiatan yang dapat menjadi peluang bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar di dunia nyata, karya, pengembangan karakter, sikap dan keterampilan dapat disempumakan dengan baik karena dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar. Kebijakan Kampus Merdeka dapat membantu prodi menyiapkan lulusan dengan soft skill, hard skill, dan pengalaman di luar studi untuk dapat bertahan dalam kehidupan professional dunia kerja.

Menurut hasil penelitian (Fuadi & Aswita, 2021) konsep MBKM merupakan konsep yang menyatakan kemandirian dan kedisiplinan dalam belajar untuk mencari dan memperoleh keterampilan lulusan yang terbaik dari perguruan tinggi negeri dan swasta agar mampu bertahan dari perkembangan zaman yang semakin pesat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan delapan program MBKM yang dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi swasta, termasuk program pertukaran pelajar antar prodi dan antar perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

#### **Pembahasan**

Implementasi kebijakan MBKM guna untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul, Kemendikbud mendorong transformasi perguruan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU):

- a) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak (Pekerjaan dengan upah di atas UMR atau menjadi wirausaha )
- b) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus (Magang, pertukaran pelajar, studi dan riset)
- c) Dosen berkegiatan di luar kampus
- d) Praktisi mengajar di dalam kampus
- e) Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional
- f) Program studi berstandar internasional
- g) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
- h) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Konsep MBKM merupakan topik yang banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Konsep ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi zaman dan perubahan yang terjadi begitu cepat. Dengan bantuan program MBKM, diharapkan mahasiswa dapat mencari atau menciptakan lapangan kerja setelah lulus (Kemendikbud, 2021b). Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global (Baharuddin, 2021; Fatmawati, 2020; Tohir, 2020). Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan perwujudan dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat penting. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan peluang untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, keterampilan, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta kemandirian dalam mencari dan menemukan informasi tentang realitas dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (Dirjen Dikti

Kemendikbud, 2020). Berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan program MBKM dari tujuan utama Kampus Merdeka Belajar Merdeka adalah untuk meningkatkan daya saing pelajar (siswa dan mahasiswa) dan tenaga pengajar (guru dan dosen) di era digitalisasi dan disrupsi. Padahal, tingkat pendidikan juga bertanggung jawab untuk menjadikan anak didik lebih dewasa, berani, dan mandiri. Oleh karena itu, nuansa pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir mandiri dan kritis dalam mencari jati dirinya. Dalam konteks ini, yang penting bukanlah memberikan informasi positif kepada mahasiswa yang mereka terima begitu saja, tetapi untuk mengajarkan kemampuan berpikir logis kepada mahasiswa.

Program magang dilakukan 1-2 semester dengan melakukan pembelajaran langsung di tempat magang. Kegiatan selama 4 bulan tersebut setara dengan 20 sks yang dinyatakan sebagai kompetensi dalam bentuk hard skill dan soft skill. Kegiatan pembelajaran MBKM ini dilaksanakan bekerja sama dengan mitra seperti rumah sakit, puskesmas, perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan lembaga pemerintah. Mahasiswa memperoleh hard skill seperti kelincahan, keterampilan pemecahan masalah yang kompleks dan keterampilan analitis. Sedangkan soft skill seperti profesional/etika kerja, komunikasi, kerjasama, dll. dianjurkan (Kemendikbud, 2021). Di antara berbagai kebijakan sosialisasi MBKM, setidaknya diberikan delapan contoh kegiatan MBKM untuk diseleksi. masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strateginya. Kegiatan MBKM harus mampu memberikan pengalaman lapangan yang kontekstual yang meningkatkan keterampilan siswa secara keseluruhan, kesiapan kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

#### **D. KESIMPULAN**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Konsep MBKM merupakan topik yang banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Konsep ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi zaman dan perubahan yang terjadi begitu cepat. Dengan bantuan program MBKM, diharapkan mahasiswa dapat mencari atau menciptakan lapangan kerja setelah lulus (Kemendikbud, 2021b). Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga siap bersaing dalam dunia global (Baharuddin, 2021; Fatmawati, 2020; Tohir, 2020). Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Program magang dilakukan 1-2 semester dengan melakukan pembelajaran langsung di tempat magang. Kegiatan selama 4 bulan tersebut setara dengan 20 sks yang dinyatakan sebagai kompetensi dalam bentuk hard skill dan soft skill. Kegiatan pembelajaran MBKM ini dilaksanakan bekerja sama dengan mitra seperti rumah sakit, puskesmas, perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan lembaga pemerintah. Mahasiswa memperoleh hard skill seperti kelincahan, keterampilan pemecahan masalah yang kompleks dan keterampilan analitis. Sedangkan soft skill seperti profesional/etika kerja, komunikasi, kerjasama, dll. dianjurkan (Kemendikbud, 2021).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Pedoman Laporan MBKM UNTAG Surabaya  
Hilda W. S., & Florida, F. (2021, 05 13). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.  
Jurnal Pendidikan: <http://google.scholar.com>  
Aan, W. S., & Kholida, F. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan*, 102-107.  
Indonesia, U. P. (2020). Panduan MBKM UPI. *UPI*, 20-40.

- Siregar, N. (2020). Konsep Implementasi Kampus Merdeka Belajar. *Jurnal Edukasi Islam*, Vol. 1(1), 141-157.
- Hendrik, A. E. (2020). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, Vol 4(2), 201-209.
- Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Kampus Merdeka Belajar: <http://doi.org/10.31219/osf.io/ujtme>.